

STRATEGI BUDAYA MENGHADAPI “KERESAHAN LOKAL”

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Di dalam budaya Melayu umumnya, Melayu Riau khususnya, terdapat asas “*persatuan dan kesatuan*” yang dahulu lazim disebut “*persebatian melayu*”, yang hakikatnya berintikan nilai-nilai : “*rasa senasib sepenanggungan, seaiib dan semahu*”. Asas inilah yang selama ratusan tahun mampu merekat persatuan dan kesatuan orang Melayu yang majemuk dengan latar belakang kebudayaannya yang juga majemuk. Azas ini mengibaratkan bahwa “*persebatian melayu*” itu : “*bagaikan bersebatinya mata putih dengan mata hitam, bila yang satu rusak yang lainnya binasa*”. Asas ini pula yang mampu mengekalkan tuah dan marwah Melayu, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai cabaran baik dari dalam maupun dari luar. Asas ini pula yang kemudian mengekalkan kemelayuan yang tidak lagi semata-mata mengacu kepada suku atau etnis, tetapi mengacu kepada: “*beragama Islam, beradat (budaya) Melayu dan berbahasa Melayu*” atau secara singkat disebut: “*seagama, seadat dan sebahasa*”. Acuan inilah yang kemudian menjadi acuan utama untuk menentukan “*kemelayuan*” seseorang di dalam budaya Melayu Riau dan beberapa puak Melayu lainnya, termasuk di Malaysia, Singapura dan sebagainya, sehingga “*persebatian melayu*” itu tidak mengenal batas wilayah dan negara.

Sejarah membuktikan, dengan asas “*persebatian melayu*” itu orang-orang Melayu di Riau bahu membahu dengan Sultan Mahmud Syah I berperang melawan Portugis (1511-1528 M) mulai dari Melaka sampai ke Bintan dan Kampar. Sejarah juga menunjukkan bahwa dengan asas “*persebatian melayu*” itu pula orang-orang Melayu berjuang melawan penjajahan Belanda sejak berabad-abad yang silam sampai

Barangkali, perlu digaris bawahi, bahwa dalam kondisi seperti disebutkan di atas, lambat laun menyebabkan orang Melayu Riau kehilangan "*tokoh sentral*"nya. Walaupun di Riau banyak "*tokoh*", malahan dapat disebut "*bertebih-lebih*", tetapi kebanyakan adalah "*tokoh dari daerah asalnya*", bukan "*tokoh*" yang diakui oleh seluruh orang Riau. Kita kenal banyak tokoh dari Kampar, Bengkalis, Kepulauan Riau, Rokan, Dumai, Pelalawan, Siak, Rantau Kuantan, Rengat, Lima Koto, Pasir Pengaraian dan sebagainya, tetapi apakah di antara mereka ada yang diakui sebagai "*tokoh Riau*" dan dianggap pula sebagai "*tokoh sentral*" di Riau ini?. Akibat tidak adanya atau belum munculnya "*tokoh sentral*" inilah maka kebanyakan generasi muda Melayu Riau kehilangan tempat bertanya, kehilangan tempat berteduh, kehilangan tempat meminta petunjuk amanah dan yang terutama adalah kehilangan "*contoh*" dan "*teladan*". Karenanya, jangan pula dipersalahkan kalau generasi muda Melayu Riau kadangkala berperilaku yang cenderung "*kasar langgar*" karena memang mereka nyaris tidak menemui tokoh yang dapat menjadi teladan, yang patut dijadikan panutan dan yang layak dijadikan ikutan dalam arti luas.

III. STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU.

Kebudayaan Melayu Riau yang menjadi Kebudayaan Daerah Riau, baru dapat berkembang dan terasa manfaatnya apabila kebudayaan itu kokoh dan nilai-nilai hakikinya dicerna, dihayati dan diamalkan oleh pendukung utamanya, yakni orang Melayu Riau. Untuk sampai kepada tingkat itu, tentulah diperlukan upaya-upaya pembinaan dan pengembangan dengan strategi yang baik dan benar. Secara nasional, strategi pembinaan dan pengembangan kebudayaan diarahkan untuk:

1. Melakukan penggalian dan penelitian kebudayaan
2. Melakukan pemeliharaan dan perlindungan kebudayaan
3. Melakukan pengembangan dan pengayaan kebudayaan

4. Melakukan penanaman nilai-nilai kebudayaan
5. Melakukan penyebarluasan informasi kebudayaan
6. Melakukan pemanfaatan kebudayaan
7. Melakukan kerjasama kebudayaan

Strategi ini akan berhasil apabila semua pendukung kebudayaan itu *menyadari manfaat dan keutamaan kebudayaannya, mencintai dan bangga* kepada kebudayaannya dan *mengamalkan nilai nilai hakikinya*. Di Riau, upaya kearah pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang dilakukan selama ini, belumlah sepenuhnya mengacu kepada kebijakan di atas, bahkan, cenderung menyimpang. Penyimpangan itu diawali dengan pemahaman yang keliru mengenai kebudayaan, karena menganggap bahwa kebudayaan itu adalah *kesenian* semata. Padahal, kesenian hanya salah satu unsur dari kebudayaan. Kekeliruan ini menyebabkan upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan hampir seluruhnya diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan kesenian, sehingga unsur-unsur budaya lainnya jadi terabaikan. Akibatnya, banyak sekali unsur kebudayaan Melayu Riau yang belum terjamah, belum terangkat, belum tergali, belum terkaji, apalagi mau mengembangkannya. Bahkan tidak sedikit pula unsur-unsur kebudayaan Melayu Riau yang terabaikan sehingga mendekati kepunahannya. Karenanya, kebudayaan Melayu Riau ini keadaannya *“bagailan lerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau”*, sehingga takkan mampu Menjadi penapis masuknya unsure-unsur negatif budaya luar”

Sedangkan dari sisi lain, di Riau membanjir beragam bentuk budaya luar, yang masuk melalui berbagai saluran, termasuk alat-alat teknologi canggih yang menyebar sampai ke sudut-sudut dapaur orang Melayu. Masuknya budaya luar yang terus menerus bukan saja dapat memadamkan budaya tempatan, tetapi tidak mustahil membawa dampak negatif karena ada di antaranya yang justeru dapat merusak tatanan nilai agama, budaya dan norma-norma social orang Melayu. Kenyataan memang menunjukkan, betapa sekarang terjadi krisis akhlak di kalangan orang-orang Melayu, terjadi pemekaran tempat-tempat maksiat, peredaran narkoba, perjudian, minuman keras, dan berbagai tindakan kekerasan dan kriminal. Banyak sudah anak-anak Melayu

yang menjadi korban, mulai dari korban kemaksiatan sampai kepada korban narkoba, minuman keras dan sebagainya.

Dampak lainnya, ialah kebanyakan orang Melayu Riau, semakin kehilangan nilai-nilai hakiki kebudayaannya, kehilangan sandaran dan acuan, kehilangan pedoman dan nyaris kehilangan "*jati diri*"nya. Bahkan tidak sedikit pula orang Melayu, yang merasa "*asing*" dengan kebudayaan leluhurnya, sehingga mereka tidak berminat untuk memahami kebudayaannya. Kadaan ini pula yang secara langsung atau tidak menyebabkan munculnya "*keresahan lokal*", yang kian merisaukan itu. Asas "*persatuan dan kesatuan*" yang lazim disebut "*persebatian Melayu*" yang menjadi simpai kerukunan dan kedamaian tidak lagi diperhatikan orang. Padahal, asas persebatian inilah yang mampu menumbuh kembangkan rasa kesetia kawan sosial, menyegarkan rasa persaudaraan, mengekalkan rasa "*senasib sepenanggungan, seaiib dan semalu*". Bila asas ini kembali dihayati dengan cermat, dicerna dan dijadikan acuan dalam kehidupan berkaum bangsa, tentulah apa yang disebut sebagai "*keresahani lokal*" itu tidak akan terjadi.

Kenyataan ini haruslah dicermati oleh orang-orang Melayu Riau, agar mereka mau sadar dari kesempitan berfikir dan kesempitan wawasan. Jangan hanya terpasung oleh emosional "*putera daerah*", sepanjang satu saat ia sendiri tidak dianggap sebagai "*putera daerah*" oleh teman sejawatnya, karena sudah berlain kampung atau berlain sungai. Jangan pula hanyut dalam mimpi sambil membusungkan dada, bahwa "*saya adalah putera daerah di sini, dan sayalah yang menjadi raja di sini*". Hal itu tidak akan pernah terwujud, sepanjang asas "*persebatian Melayu*" tidak diperhatikan, dan nilai-nilai hakiki budaya Melayu tidak dihayati dan dijadikan "*jati diri*"nya. Dan lebih mustahil lagi untuk mewujudkannya, bila sesama orang Melayu terus "*gasak menggasak*", "*bantai membantai*" atau "*fitnah memfitnah*" atau "*hujat menghujat*" atau "*cerca mencerca*" sehingga waktu dan energinya habis di situ saja.

Dari sisi lain, strategi kebudayaan ini haruslah didukung oleh semua pihak, tidak hanya oleh orang Melayu Riau sebagai pendukung utama kebudayaan Melayu. Para

pendatang yang hidup dan bermukim di sini dituntut pula untuk berpartisipasi menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah ini, yakni kebudayaan Melayu Riau. Dengan demikian akan dapat diwujudkan "*persebatian Melayu*" benar-benar menjadi "*persebatian Melayu*" yang luas, yang di dalamnya berhimpun semua puak dan suku yang ada di Riau. Melalui perwujudan persebatian inilah diharapkan terwujudnya kerukunan hidup masyarakat Riau yang majemuk, yang beragam pula budaya dan agamanya.

IV. MISI KEBUDAYAAN DAERAH

Kebudayaan tentulah memiliki misi, yang mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pendukungnya dan masyarakat luas, termasuk bangsa dan negara. Semakin jelas misi suatu kebudayaan, semakin terarah upaya pembinaan dan pengembangannya, dan semakin besar manfaat yang diperoleh.

Secara umum, inti pati misi kebudayaan adalah:

1. Membina kebudayaan daerah dan (kebudayaan bangsa) sebagai upaya untuk mencapai kemajuan adab, budaya, persatuan bangsa, memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan itu sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat pendukungnya.
2. Mengembangkan kebudayaan daerah (kebudayaan bangsa) sebagai upaya perluasan, pendalaman, dan peningkatan mutu kebudayaan daerah (kebudayaan bangsa).
3. Melindungi kebudayaan daerah (kebudayaan bangsa) dari ancaman budaya asing yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kemusnahan kebudayaan daerah (kebudayaan bangsa).

4. Memanfaatkan kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Misi ini akan tercapai, apabila pendukung kebudayaan itu merasa memiliki, bangga dan mau menjadikannya sebagai "*jati diri*" nya. Lalu bagaimana dengan orang Melayu Riau? Apakah selama ini mereka merasa memiliki kebudayaannya? Apakah mereka selama ini merasa bangga kepada kebudayaannya? Apakah selama ini mereka menjadikan kebudayaan daerah ini sebagai "*jati diri*" nya? Nampaknya, masih banyak orang Melayu Riau yang belum merasa memiliki kebudayaannya, belum merasa bangga dengan kebudayaannya, dan belum pula menjadikan kebudayaan ini sebagai "*jati diri*" nya. Kenyataan menunjukkan, tingkat pemahaman kebanyakan orang Melayu terhadap kebudayaannya belumlah sampai pada tingkat pemahaman yang dapat membentuk kepribadian Melayu yang handal, yang kemelayuannya nampak dalam setiap perilaku dan budi pekertinya.

Memang benar bahwa orang Melayu akan marah besar bila dikatakan "*tidak berbudaya*", atau dikatakan "*tidak beradat*", (walaupun kenyataannya memang ada yang tidak tahu adat dan kebudayaannya), tetapi kemarahan itu belumlah dapat dijadikan tolok ukur atas kesetiaan mereka kepada kebudayaannya. Sebab kemarahan itu timbul karena "*gengsi*" dan "*emosi*", bukan karena kecintaan atau kebanggaan kepada kebudayaannya. Sebaliknya, ada pula orang Melayu yang menganggap kebudayaan Melayu Riau sudah "*kuno*", yang hanya patut dijadikan pajangan di museum, yang tidak serasi dengan masa kini apalagi masa mendatang.

Kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang, jelas kelihatan bahwa di daerah Riau, misi kebudayaan nyaris tidak berhasil. Akibatnya terjadilah apa yang sekarang dirisankan sebagai "*keresahan loka*", serta berkembangnya perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan nilai budaya Melayu, merebaknya perbuatan maksiat, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya yang dapat merusak tatanan hidup masyarakat itu sendiri dalam arti luas. Padahal, seandainya misi kebudayaan itu berjalan, tentulah orang Melayu sudah mampu menjadi "*tuan di rumahnya sendiri*", sudah mampu mampu

menghadapi semua tantangan, sudah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, dan akan mampu pula menghadapi cabaran hari depannya dan sebagainya.

Perlu pula digaris bawah, bahwa misi kebudayaan di setiap daerah, bukan hanya ditujukan kepada anak daerahnya saja, tetapi diberlakukan pula bagi siapa saja yang hidup dan bermukim di daerah itu. Demikian juga dengan kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan daerah Riau, misinya harus meliputi seluruh lapisan masyarakat yang hidup dan bermukim di Riau. Karenanya, adalah kewajiban semua pihak, kewajiban semua suku bangsa yang bermukim di Riau untuk bahu membahu meningkatkan "*persatuan dan kesatuan*" antar semua suku, turut bertanggungjawab dalam menyebarkan nilai-nilai budaya Melayu, dan "*tahu diri*" pula dalam menjalani hidupnya sebagai penduduk Riau.

IV. STRATEGI BUDAYA MENGHADAPI "KERESAHAN LOKAL"

Kebudayaan Melayu sejak dahulu sudah membuktikan kemampuannya dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan tenggang menenggang, bahkan sampai pada tingkat "*persebatian melayu*" yang diibaratkan kekentalannya "*bagaikan bersebatnya mata putih dengan mata hitam*". Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan Melayu memiliki nilai-nilai hakiki yang dapat diandalkan untuk mengekalkan "*persatuan dan kesatuan*" bangsa, serta mampu mengangkat harkat dan martabatnya. Walaupun kemudian terjadi hal-hal yang cenderung memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakatnya, terjadi perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya kearah yang negatif, terjadi perubahan pola fikir dan perilaku yang buruk, tentulah bukan karena kesalahan kebudayaannya, tetapi karena masyarakat pendukungnya yang tidak lagi mau mengacu kepada nilai-nilai luhur yang ada di dalam kebudayaannya.

Sekarang di Riau terjadi semacam "*keresahan lokal*", atau semacam ketidak sesuaian antar sesama orang Melayu, sehingga lahirlah gagasan-gagasan yang menimbulkan sikap pro dan kontra. Di antaranya yang paling menonjol adalah

munculnya gagasan untuk “*membagi-bagi*” Provinsi Riau Menjadi tiga provinsi, yakni : “*Provinsi Riau*”, “*Provinsi Kepulauan Riau*” dan “*Provinsi Bengkalis*”. Gagasan ini kemudian diteruskan dengan upaya nyata, terutama untuk mewujudkan terbentuknya “*Provinsi Kepulauan Riau*”. Bahkan perjuangan ini sudah sampai ke tingkat nasional dan tersebar luas sampai kemana-mana. Sejak itu, muncullah beragam komentar dan pendapat, ada yang setuju kemudian mendukungnya habis-habisan, ada yang tidak setuju dan berusaha pula untuk meredamnya, dan ada pula yang diam membatu.

Kenyataan ini tentulah harus disimak secara arif dan bijak, dicerna dengan fikiran jernih dan hati lapang, tidak dapat disikapi hanya dengan emosi atau “*agak-agak*”, karena munculnya gagasan dan upaya ini tentulah memiliki latar belakang yang panjang. Sebaiknya, sebelum memberikan pendapat dan komentar, hendaklah ditelusuri bagaimana proses kehidupan orang Melayu Riau selama ini. Apakah mereka sesama orang Melayu di Riau ini hidup rukun dan damai ataukah tidak. Apakah mereka sesama orang Melayu Riau ini saling diikat dengan rasa “*persebatian melayu*” ataukah sekedar “*persebatian di mulut*” saja. Apakah selama ini antara orang Melayu di Kepulauan Riau dengan orang Melayu di Daratan benar-benar merasa “*seaiib semalu dan senasib sepenanggungan*” atau tidak. Apakah orang Melayu di Kepulauan Riau ini mendapat *perlakuan yang sama* dengan orang Melayu di Daratan ini dalam banyak hal atau tidak. Dan masih banyak lagi yang perlu disimak dan dikaji ulang.

Untuk menjawab semua pertanyaan itu tentulah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, memerlukan kecermatan dan keterbukaan. Dan tentulah akan banyak versi yang ditemui, dan banyak pula pendapat dan komentar dan argumentasi yang akan dibahas. Namun dari sudut budaya, mungkin saja terjadi perbedaan pandangan. Karena budaya tidak mengenal batas daerah, tidak mengenal batas wilayah dan negara, budaya dapat masuk dan mengalir kemana saja bagaikan angin. Semuanya tergantung kepada pendukungnya.

Dari kacamata budaya, apa yang terjadi di Riau sehingga menimbulkan “*keresahan*”, “*kecemasan*”, “*kegamangan*” adalah akibat dari pola sikap dan prilaku

orang Melayu Riau selama ini, yang secara sadar atau tidak, menjerumuskan dirinya ke dalam kancah "*pertelikaian sekandang*" yang dibuat dan diciptakannya sendiri pula. Sikap dan perilaku itu muncul dan berkembang, karena mereka telah "*mengabaikan*" budayanya sendiri, dan menafikan nilai-nilai hakikinya. Dalam kondisi yang "*babak belur*" itu, tidak mustahil dimanfaatkan pihak lain, agar orang Melayu semakin emosional dan semakin tajam pula pertelikaian antar sesamanya. Namun, sebagai orang yang berbudaya, alangkah lebih arif bila orang Melayu itu mau merenung dan mengoreksi dirinya terlebih dahulu, sebelum *bersangka buruk* atau menimpakan kesalahan ke pihak lain. Dengan mengoreksi diri sendiri, akan diketahui siapa yang salah, dan apanya yang salah, sehingga memudahkan untuk memperbaikinya.

Sekarang orang Melayu Riau berada dalam *keresahan*, resah karena Riau akan terpecah-pecah menjadi tiga atau dua "*provinsi*"; resah karena takut berpisah dengan saudara sendiri; resah karena kuatir kalau-kalau "*provinsi*" yang baru itu nanti akan *dimanfaatkan orang lain sehingga orang Melayu di sana akan terkikis*; resah karena cemas orang Melayu akan *berpecah belah*; resah karenaimbang kalau-kalau "*provinsi*" baru itu akan dijadikan orang "*tambang emas*" kelompok atau orang tertentu; resah karena lahirnya "*provinsi*" baru itu akan semakin melemahkan dan meluluh lantakkan persatuan dan kesatuan Melayu, dan sebagainya.

Dengan bersangka baik tentu dapat diartikan, munculnya "*keresahan*" itu memberi petunjuk bahwa hakikatnya orang Melayu Riau masih "*berhati perut*", masih memiliki rasa tenggang rasa, masih memiliki rasa persaudaraan antar sesama orang Melayu, masih memiliki tanggungjawab moral terhadap nasib sesamanya, masih memikirkan hari depan saudara-saudaranya dan sebagainya. Hal ini tentulah baik, dan patut dipuji. Tetapi secara jujur harus pula dipertanyakan, apakah selama ini rasa seperti itu masih ada? Apakah selama ini orang Melayu Riau memikirkan nasib saudaranya sesama Melayu? Apakah selama ini antara orang Melayu Kepulauan dengan Melayu Daratan ini saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, bela membela dan sebagainya?

Kalau kita mau mengakui secara jujur, tanpa didahului oleh “*sangka buruk*”, tentulah akan kelihatan, bahwa munculnya gagasan dan keinginan dari beberapa kabupaten untuk membentuk *provinsi* sendiri, memisahkan diri dari Provinsi Riau sekarang, dilatar belakangi dan berkait mait dengan kondisi orang Melayu Riau selama ini, termasuk prilaku pemerintah daerah Riau sendiri.

Tidak mustahil selama ini orang-orang Kepulauan Riau merasa seakan “*dianak tirikan*” oleh Pemda Riau, merasa diabaikan dalam banyak hal, sehingga mereka merasa diperlakukan tidak adil. (perasaan itu dirasakan pula oleh beberapa kabupaten lainnya) Dan tidak pula mustahil, bahwa selama ini ada kekurang serasian antara orang Melayu Kepulauan Riau dengan orang Melayu di daratan ini, yang sebab musababnya harus disimak secara arif dan mendalam. Yang mungkin saja kait mengait dengan sejarah masa silam. Selanjutnya, tidak pula mustahil, dari tumpukan rasa ketidak adilan, rasa kesenjangan dan sebagainya itu yang selama ini mereka pendam, lalu mencuat ke permukaan dan melahirkan gagasan dan upaya untuk mendirikan “*provinsi*” sendiri. Prilaku ini, secara lahiriah dapat disamakan dengan perasaan dan sikap orang Riau terhadap pemerintah pusat yang juga merasa dirinya diperlakukan semena-mena dan tidak adil selama ini.

Dalam menghadapi “*keresahan lokal*” yang tidak mustahil akan membawa masalah yang lebih besar, perlu disikapi secara jernih dan berlapang dada. Sebab bila ditanggapi dengan emosional, tidak pula mustahil akan dapat meremuk redamkan orang Melayu Riau. Karenanya, perlu diambil kebijakan budaya, yang hakikatnya mengacu kepada tatanan nilai “*persebatian Melayu*”, agar Melayu Riau yang dilanda “*keresahan*” ini tidak “*lepas kendali*” dan tidak “*bantai membantai*”. Sebaliknya, bila orang Melayu tidak mampu mengekang diri, tentulah keadaan akan semakin parah, dan manfaatnya dipetik pihak lain yang memang menunggu-nunggu peluang untuk menguasai Riau dalam segala bidang.

Berpijak kepada fikiran itu, sebaiknya dilakukan upaya-upaya:

1. Menyadarkan semua pihak, bahwa orang Melayu Riau hakikatnya adalah Melayu yang "*senasib dan sepenanggungan, seaiab dan semalu*" yang dahulu mampu mewujudkan "*persebatian melayu*" yang tangguh dan handal.
2. Menyadarkan semua pihak, bahwa hakikatnya, yang dimaksud dengan orang Melayu Riau adalah "*beragama Islam, beradat (budaya) Melayu, dan berbahasa Melayu,*" tanpa lagi mempertanyakan asal usulnya.
3. Menyadarkan semua pihak, bahwa wawasan kemelayuan orang Riau, adalah wawasan yang luas, yang tidak terikat oleh batasan wilayah dan negara.
4. Menyadarkan semua pihak, bahwa ruang lingkup "*putera daerah*" Riau, sebaiknya mencakupi seluruh wilayah provinsi Riau, agar tidak terjebak ke dalam rasa kedaerah yang sempit yang akan merugikan orang Melayu Riau itu sendiri.
5. Menyadarkan semua pihak, bahwa setiap permasalahan yang timbul di daerah ini, diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan dijiwai oleh semangat "*persebatian melayu*".
6. Menyadarkan semua pihak, untuk menghentikan "*pertelikaian*" antara sesama orang Melayu Riau, agar dapat lebih banyak dan lebih tekun menghadapi tantangan masa depan yang penuh tantangan dan cabaran.
7. Menyadarkan semua pihak, bahwa cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata melalui pemekaran daerah, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara lain, sepanjang dilandasi oleh itikad baik dan akhlak yang baik pula.
8. Menyadarkan semua pihak, bahwa dengan semakin banyaknya pendatang baru, semakin berkembangnya daerah ini, memerlukan upaya agar kebudayaan

II. LATAR BELAKANG MELEMAHNYA "PERSEBATIAN MELAYU" DI RIAU.

Ketika rakyat Riau memperjuangkan agar Kresidenan Riau dijadikan Provinsi Riau, seluruh rakyat waktu itu mendukungnya, dengan harapan Riau dapat menjadi provinsi tempat orang-orang Melayu hidup sejahtera, rakyatnya aman dan damai, maju, berpendidikan, dan dapat mengangkat harkat dan martabat kemelayuan dalam arti luas. Waktu itu, disadari oleh semua pihak bahwa yang dimaksud dengan rakyat Riau ialah "*seluruh rakyat yang sudah turun temurun bermukim di Riau, diakui sebagai rakyat Riau, tanpa mempermasalahkan asal-usul, puak dan sukunya*". Asas inilah yang menjadi acuan masyarakat, sehingga tercipta kerukunan hidup antar sesama anggota masyarakat, yang mencerminkan asas "*persebatian melayu*" yang mereka warisi turun temurun.

Upaya rakyat Riau memperjuangkan kresidenan Riau menjadi provinsi itu akhirnya terwujud dengan diundangkannya Undang Undang No.61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Riau. Seluruh rakyat Riau berharap, agar provinsi ini benar-benar menjadi provinsi yang makmur, karena sumber alamnya yang berlimpah, dan tentulah diidam-idamkan pula agar orang Melayu Riau dapat membenahi dirinya, mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

Pada masa awal berdirinya provinsi ini, lapangan kerja memang terbuka lebar, sedangkan orang Melayu Riau Riau belum mampu mengisi semuanya karena keterbatasan pendidikan dan sebagainya. Sejak itu, pendatangpun semakin deras mengalir, turut mengisi lapangan kerja yang memang terbuka untuk semua orang, yang disambut orang Melayu Riau dengan dada lapang, sesuai dengan "*tunjuk ajar Melayu*" yang selalu *bersangka baik* dan *terbuka* menerima siapapun yang datang. Selanjutnya, walaupun pendatang semakin banyak, kerukunan hidup antar sesama anggota masyarakat tetap berjalan dengan baik, karena masing-masing pihak "*tahu diri*", tahu tenggang menenggang, saling hormat menghormati dan saling arif menjaga perasaan masing-masing, sesuai dengan prinsip: "*dimana bumi dipijak, d isitu langit dijunjung*,

dimana air disauk di situ ranting dipatah.. Kemajemukan masyarakat Melayu pun makin bertambah, karena sebagian pendatang secara berangsur meleburkan dirinya kedalam kemelayuan Riau, kemudian menjadi orang Melayu Riau, (terutama generasi mudanya yang memang lahir dan dibesarkan di Riau., sehingga mereka benar-benar merasa sebagai orang Riau).

Pada mulanya, orang Melayu Riau tidak mempermasalahakan siapa yang menjadi Gubernur, siapa yang menjadi Residen, siapa yang menjadi Bupati, siapa yang menjadi Patih dan seterusnya. Apalagi waktu itu pejabat-pejabat teras daerah diangkat oleh pemerintah pusat, dan daerah menerimanya dengan senang hati. Ambisi untuk menjadi pejabat teras nyaris tidak nampak, karena orang Riau saat itu "*tahu diri*" pula bahwa mereka, waktu itu, belum berpeluang untuk menjadi pimpinan tertinggi di Riau ini. Barulah kemudian Arifin Ahmad muncul menjadi Gubernur (1968) dan kader-kader orang Melayu Riau pun mulai muncul dan jumlahnya semakin banyak pula.

Karena lapangan kerja masih banyak, maka orang Melayu Riau yang sudah bekerja di Pekanbaru *menjemput* saudara mara dan *orang sekampungnya* untuk bekerja di Pekanbaru. Mereka pun dengan mudah dapat mengisi lapangan kerja itu, terutama di Kantor Gubernur Riau dan kantor-kantor lainnya. Lambat laun, Pekanbaru yang sejak tahun 1960 menjadi Ibukota Provinsi Riau semakin ramai, dihuni oleh orang Melayu Riau yang datang dari berbagai Kabupaten di Riau dan oleh pendatang dari luar Riau yang terus menerus meningkat. Dalam kurun waktu 1960 -1970 itu pula di Pekanbaru berdiri organisasi "*kekeluargaan*" dari masing-masing daerah di Riau, seperti "*Ikatan Keluarga Bengkalis*", "*Himpunan Keluarga Rokan*", "*Ikatan Keluarga Inderagiri*", "*Ikatan Keluarga Pelalawan dan Sekitarnya*" dan sebagainya, yang hakikatnya untuk memudahkan silaturahmi antar sesama masyarakat "*sekampung halaman*" terutama dalam urusan nikah kawin atau mati hilang. Sejalan dengan itu, mulai tumbuh upaya-upaya agar kebudayaan daerah Riau (budaya Melayu) dapat bangkit dan berkembang, karena dimasa-masa sebelumnya nyaris tidak menampakkan batang hidungnya. Lahirlah "*Pondok Seni Rupa Riau*"(1961-1983), "*Lembaga Karya Budaya Daerah Riau*" (1962-1968), dan beberapa grup kesenian lainnya.

Karena Riau makin terbuka dan pendatang terus mengalir, orang Melayu Riau menyadari pula perlunya meningkatkan pembinaan kebudayaan Melayu Riau, agar budaya Melayu itu dapat berkembang sebagai kebudayaan daerah Riau, dan menjadi "jati diri" orang Melayu Riau sebagaimana berlaku dimasa-masa sebelumnya. Kesadaran ini kemudian melahirkan organisasi yang lebih kokoh, diantaranya "Badan Pembina Kesenian Daerah Riau" (1968-1978), dan "Lembaga Adat Daerah Riau" (1971) yang kemudian dalam Mubesnya tahun 1994 diubah menjadi "Lembaga Adat Melayu Riau" sampailah sekarang.

Beranjak dari adanya organisasi kekeluargaan, dan organisasi seni dan kelembagaan adat itu, secara berangsur-angsur "persebatian Melayu" cenderung semakin kokoh dan hubungan dengan masyarakat pendatang tetap pula berjalan serasi. Namun, menjelang akhir tahun 1970-an, lapangan kerja yang semula banyak semakin menyempit. Penerimaan pegawai negeri tidak lagi seleluasa tahun-tahun sebelumnya. Maka secara berangsur, terjadilah "persaingan" antara orang Melayu Riau dengan pendatang, bahkan merebak sampai ke "persaingan" antara sesama orang Melayu itu sendiri. Selanjutnya, semakin sedikit peluang kerja, semakin sengit persaingan, sehingga menjaral sampai ke perguruan tinggi, yang dikuasai oleh orang-orang dari daerah tertentu saja. (misalnya diisukan, bahwa UNRI "dikuasai" orang-orang Taluk Kuantan, UIR "dikuasai" Orang-orang Rokan, IAIN "dikuasai" Orang-orang Kampar dan UNILAK "dikuasai" Orang-orang Rengat/Indragiri). Akibat sengitnya persaingan dan penguasaan lapangan kerja, baik di Kantor Gubernur maupun di perguruan tinggi, mulailah terjadi "keretakan" dalam "persebatian melayu". Berkembanglah rasa "daerah-isme" dan "kampung-isme" yang kadangkala disebut "sungai-isme", dan mulailah timbul suara-suara sumbang yang saling "iri mengiri" antar sesama orang Melayu Riau. Sejalan dengan itu, mulai pula timbul kecemburuan sosial antara orang Melayu Riau dengan pendatang, sehingga keserasian hidup bermasyarakat mulai terganggu. Apalagi, di dalam menghadapi "persaingan" yang kian tajam itu, masing-masing kelompok mengokohkan barisan, sehingga lahirlah "kotak-kotak" kedaerahan yang sempit. Orang-orang pendatangpun membentuk organisasi "kekeluargaan" masing-masing yang

hakikatnya juga mengacu kepada kampung halamannya pula. Keadaan ini menyebabkan wawasan Melayu Riau yang semula luas, mulai menciut kepada "*wawasan sungai*" atau "*wawasan kampung halaman*" masing-masing.

Dalam kurun waktu selanjutnya, daerah Riau pun berkembang menjadi kawasan industri dan perkebunan besar, yang memikat banyak pendatang baru untuk mengisi lapangan kerja dan usaha. Maka arus pendatang tidak terbenung lagi, persainganpun semakin ketat. Sejak itu terjadi dua "*gelanggang*" perebutan lapangan kerja yakni: lapangan kerja menjadi karyawan swasta dan lapangan kerja menjadi pegawai negeri. Para pendatang lebih banyak unggul dalam merebut lapangan kerja swasta, sedangkan orang Melayu Riau tidak pula terlalu unggul dalam mengisi lapangan kerja pegawai negeri. Dan yang lebih malang lagi, dalam berebut lowongan untuk menjadi pegawai negeri ini, orang-orang Melayu secara sadar atau tidak menjadi semakin "*terkotak-kotak*" dan bibit-bibit perpecahan pun muncul ke permukaan. Sedangkan pendatang yang menguasai lowongan kerja di swasta, semakin kokoh, sehingga orang Melayu Riau yang berusaha masuk nyaris tidak berdaya. Apalagi, beredar pula isu bahwa orang Melayu Riau "*pemalas*", "*perajuk*" dan "*kurang memiliki kemampuan*", sehingga lapangan kerja di perusahaan swasta semakin tersumbat untuk orang Melayu Riau. Akibatnya, hampir di seluruh perusahaan besar di Riau diisi oleh pendatang, sedangkan orang Melayu Riau kebanyakan menjadi penonton sambil "*mengeluh*" dan "*mengurut dada*". Maka harapan bahwa provinsi Riau yang diperjuangkan rakyat Riau itu akan membawa kesejahteraan ternyata masih tinggal harapan, karena sampai tahun 1979, rakyat Riau masih berada dalam tingkat "*miskin*", "*hampir miskin*", sebagian berada di bawah garis kemiskinan dan sebagian termasuk "*miskin sekali*".

Dalam perkembangan selanjutnya, di Riau terjadi beberapa kali penggantian Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Tetapi karena orang Melayu sudah "*terkotak-kotak*" dan tidak lagi menunjukkan "*persebatian melayu*" sehingga sulit mencari kekompakan antara sesama mereka, maka peluang itu diisi orang luar. Kalau pun ada peluang yang nyaris dapat diambil orang Melayu, (peristiwa Ismail Suko) juga mengalami kegagalan.

Kondisi ini lambat laun disadari orang Melayu Riau, sehingga muncullah gagasan yang kemudian menjadi kesepakatan banyak orang agar Gubernur Riau haruslah “*putera daerah*”. Gagasan ini tentulah didukung dengan alasan bermacam ragam, ada alasan politis, ada alasan kepentingan tertentu, ada pula alasan yang benar-benar mengharapkan Riau dipimpin oleh orang Melayu Riau, agar dapat mengangkat harkat dan martabat daerah ini secara lebih baik dan orang-orang Melayu Riau berpeluang untuk mengatur rumahtanggany dengan lebih leluasa.

Ketika dilakukan pemilihan Gubernur Riau dan dicanangkan bahwa Gubernur Riau haruslah “*putera daerah*” Riau, semua orang mengacungkan jempol dan menganggukkan kepala tanda setuju. Maka dukunganpun mengalirlah dari seluruh pelosok, mulai dari peringkat RT sampailah ke peringkat “*provinsi*”. Dan nama-nama balon pun mencuat bagaikan cendawan tumbuh. Dari banyaknya nama balon “*putera daerah*” itu diketahui, bahwa sebenarnya Riau ini amat kaya dengan “*putera daerah*”, sayangnya, mereka baru muncul ketika ada peluang untuk menjadi Gubernur, sedangkan sebelumnya menyuruk entah dimana. Aspirasi pun muncul sampai “*berpikul-pikul*” beratnya. Tukang stempel pun panen, karena mendapat pesanan membuat stempel berbagai organisasi, yang sebelumnya tidak pernah terdengar kabar berita keberadaannya, Masing-masing tim sukses sibuk mencari pendukung dari berbagai dusun dan desa, suak dan sungai, selat dan tokong pulau, yang intinya mencalonkan “*putera daerah nya masing-masing*”.

Sejak, itu, sadar atau tidak, terbukalah pintu yang menjebak “*anak-anak*” Melayu daerah ini untuk “*bertarung sama sekandang*”. Pertarungan itu kemudian merebak lagi saat dilakukan pemilihan Bupati di beberapa daerah, yang juga menempatkan acuan “*putera daerah*” sebagai syarat yang tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian terus lagi merebak dengan dimekarkannya beberapa Kabupaten dan Kota di Riau, yang pegawainya harus pula diisi oleh “*putera daerah setempat*”. Sedangkan apa kriteria “*putera daerah*” itu masih tetap simpang siur, sehingga masing-masing orang atau kelompok menafsirkannya sesuai dengan kepentingan mereka pula.

Dari semua itu apa yang perlu disimak?

Niat baik yang semula ingin provinsi ini dipimpin orang Riau, yang kemudian dicontoh oleh Kabupaten agar Bupati nya anak tempatan, dan seterusnya, lambat laun menjebak orang Melayu Riau ke lingkaran yang semakin mengecil. Bila awalnya wawasan "*putera daerah*" ruang lingkungannya seluas "*provinsi*", kemudian menciut menjadi seluas "*kabupaten*" dan seterusnya akan lebih menciut lagi entah nanti sampai ke batas Kecamatan dan Desa.

Kedadaan ini jelas merugikan, karena dari satu sisi mempersempit wawasan, sedangkan dari sisi lain semakin memperbanyak "*kotak-kotak*" antar sesama orang Melayu Riau yang semuanya adalah putera daerah ini. Akibat dari wawasan yang semakin menyempit itu, menyebabkan upaya pengisian kekosongan SDM di daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang baru dimekarkan sulit untuk dipenuhi, karena pemisahan Kabupaten dianggap berpisah pula kesatuan "*putera daerah*" nya,

Bila hal ini terus berlanjut, dikuatirkan akan memunculkan "*kotak-kotak*" Melayu yang semakin sempit, yang memilah-milah kemelayuan dengan sebutan seperti :: "*Orang Kuantan*", "*Orang Rengat*", "*Orang Tembilahan*", "*Orang Lima Koto*", "*Orang Kampar Kiri*", "*Orang Pasir*", "*Orang Rokan*", "*Orang Bagan*", "*Orang Siak*", "*Orang Pelalawan*", "*Orang Bengkalis*", "*Orang Dumai*", "*Orang Tanjungpinang*", "*Orang Karimun*", "*Orang Natuna*", "*Orang Pulau Tujuh*", "*Orang Selatpanjang*", "*Orang Pekanbaru*" dan seterusnya, yang tidak mustahil satu saat akan menghilangkan sebutan "*Orang Riau*", sehingga "*kesatuan Riau*" yang seharusnya dikentalkan dan dikekalkan menjadi tercabik-cabik. Dan akan menjadi lebih malang lagi, bila antara "*Orang Orang*" itu terjadi persaingan yang tidak sehat, apalagi sampai jatuh menjatuhkan, "*gasak menggasak*", "*bantai membantai*", "*bedal membedal*" dan sebagainya.

Seandainya apa yang dikuatirkan di atas terjadi, tentulah orang Melayu Riau akan semakin lemah, dan semakin sibuk dalam kancah "*pertelikaian sekandang*", yang ujung-ujungnya akan "*meluluh lantakkan*" sendi-sendi "*persebatian melayu*" di Riau ini.

Gejala memudarnya rasa “*persebatian melayu*” semakin mencuat, antara lain ditandai dengan pelaksanaan “*Kongres Rakyat Riau*” yang berawal dari beragam “*sangka buruk*” dan “*tuduh menuduh*”, yang sidang-sidangnya dimeriahkan dengan “*basuh membasuh*”, sehingga sampai kesaat pembubaran Panitia Kongres yang juga ditutup dengan rasa *curiga mencurigai dan saling tuding menuding*. Sedangkan hasil Kongres yang menelan dana milyaran rupiah itu nyaris tidak terdengar kabar beritanya.

Sebenarnya masih banyak contoh yang dapat disimak, yang semuanya menunjukkan betapa “*persebatian melayu*” semakin goyah dan “*centang perenang*”, betapa orang Melayu sibuk “*belantak dan betekak sesama dia*”, menghabiskan tenaga dengan sia-sia. Kesemuanya itu tentulah menambah *keresahan* dan *kerisauan* di hati orang-orang Melayu yang melihat kejadian itu sebagai hal yang seharusnya tidak perlu terjadi..

Selanjutnya kita mendengar pula semakin maraknya keinginan dari beberapa kabupaten untuk membentuk “*provinsi*” sendiri atau membentuk “*wilayah-wilayah*” persekutuan beberapa kabupaten, atau merujuk kepada wilayah “*afdeeling*” atau “*kesatuan wilayah kerajaan*” dan sebagainya, yang konon dilatar belakangi oleh niat untuk *mensejahterakan orang Melayu tempatan*. Niat baik untuk mensejahterakan orang Melayu tempatan itu memang patut dipuji. Namun perlu dijaga, agar upaya itu tidak menimbulkan perpecahan atau pertikaian antara sesama orang Melayu, terutama antara orang-orang Melayu tempatan, yang dapat meremuk redamkan “*persebatian melayu*” dalam arti luas. Sebab bila tidak diwaspadai sejak dini, tidak mustahil yang terjadi ialah: “*hajat belum sampai, niat belum tercapai, awak sesama awak dah berbantai dan berpecah belah ,orang lain yang akan memanfaatkannya*”. Seperti kata pepatah lama: “*Kapal pecah, hiu yang kenyang*”.

Contoh-contoh di atas sepatutnya disimak dengan kearifan dan dada yang lapang.. Seharusnya, kita merenung jauh ke depan, dan memandang kembali ke belakang. Bahwa Riau pernah kokoh dan berpadu dalam upaya memperjuangkan Provinsi Riau tahun 1950-an, dan pernah pula “*terkotak-kotak*” ketika berebut posisi

setelah Riau menjadi provinsi. Bahkan, perguruan tinggi di Riau sebagai sarang intelektual bangsa, tidak luput pula dari perebutan untuk saling mendominasi, yang akibatnya menyebabkan perkembangan perguruan tinggi kita sempat tersendat-sendat, pengkaderan orang Melayu Riau menjadi pincang, dan isu "*kampung-isme*" atau "*sungai-isme*" menghantui persatuan Melayu Riau waktu itu. Dampaknya pun sampai sekarang masih terasa.

Sebaiknya, apa yang terjadi selama ini dijadikan pengalaman berharga, agar orang Melayu Riau yang jumlahnya semakin kecil, tidak lagi *memperkecil dirinya*, dan tidak pula saling "*kecil mengecilkan*", apalagi sampai saling "*bantai membantai*" dan "*kucil mengucilkan*". Sudah saatnya orang Melayu Riau menyadari kenyataan, bahwa penduduk daerah Riau bukan hanya orang Melayu Riau, tetapi banyak pendatang yang beragam corak dan beragam budaya. Bahkan jumlah pendatang sudah melebihi jumlah orang Melayu Riau. Di beberapa kawasan, termasuk di kota Pekanbaru, perbandingan penduduk asal pendatang dengan orang Melayu Riau sudah berkisar antara : 3 : 1, atau 4 : 1 atau 8 : 2, bahkan ada yang mendekati 9 : 1. Kenyataan ini perlu diartikan, supaya orang Melayu Riau yang semakin "*kempis*" itu dapat mengekalkan *persebatian* antar sesamanya dan dapat pula menjalin dan membina hubungan baik dengan semua puak dan suku pendatang.

Sudah saatnya Orang Melayu Riau menghentikan semua "*pertelikaian*" antar sesamanya, kemudian menyusun kesatuan yang kokoh agar dapat duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang merisaukan dan "*meresahkan*" Riau ini. Sudah saatnya pula orang Melayu Riau berupaya untuk mengembalikan "*persebatian Melayu*", agar mereka menjadi kokoh dan berwibawa. Sudah saatnya orang Melayu Riau mengekalkan kembali nilai-nilai budaya daerah Riau, yakni Budaya Melayu Riau, agar nilai-nilai hakikinya dapat kembali menjadi "*jati diri*" nya. Dan sudah saatnya pula orang Melayu Riau merujuk kembali kepada asas yang dianut budaya Melayu, yang menyepakati bahwa orang Melayu Riau, ialah "*seagama (Islam), seadat (budaya) Melayu dan sebahasa (Melayu).*" Dengan kesadaran ini, diharapkan agar pembakuan "*putera daerah*" tidak menjadi *bumerang* yang memukul orang Melayu itu sendiri.